

PROBLEMATIKA PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Oleh: M. Yusuf

Abstrak

KTSP sebenarnya sudah berhasil mengakomodasi tuntutan pendidikan abad ke-21 yang sangat menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan komunikasi dan sosial, kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil risiko (risk-taking skills). Permasalahan dalam dunia pendidikan tidak bisa terselesaikan dengan menggunakan pendekatan satu aspek saja. Misalnya dalam masalah kurikulum, problem yang muncul merupakan akibat dari sistem pendidikan yang salah, dan kesalahan dalam hal ini akan berdampak pada sistem secara keseluruhan. Sehingga menghasilkan lingkaran setan, yang jaring-jaringnya tidak akan terputus, sebelum adanya perombakan secara sistemik terhadap kebijakan di bidang pendidikan

Kata Kunci: Problematika, KTSP

A. Pendahuluan

KTSP diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada tahun 2006 telah diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor: 22 tentang Standar Isi (SI),¹ Nomor: 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL),² dan Nomor: 24 tentang Pelaksanaan SI

¹ Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat: 1) kerangka dasar dan struktur kurikulum; 2) beban belajar; 3) kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan 4) kalender pendidikan.

² Standar kompetensi lulusan (SKL) digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

dan SKL untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengacu pada SI dan SKL ini, sekolah-sekolah yang mampu (memiliki sumber daya pendidikan memadai), diharapkan pada tahun pelajaran 2006/2007 telah mengembangkan dan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk sekolahnya masing-masing. Sedangkan bagi sekolah yang kurang mampu, diharapkan paling lambat pada tahun 2009/2010 telah mengembangkan KTSP untuk sekolahnya. Gubernur dapat mengatur pelaksanaan KTSP di wilayahnya untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus; sedangkan Walikota/Bupati dapat mengatur pelaksanaan KTSP di daerahnya untuk satuan pendidikan SD dan SMP.³

Melalui kebijakan KTSP, sekolah-sekolah diberi kebebasan menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan konteks lokal, kemampuan siswa, dan ketersediaan sarana-prasarana. Kebebasan semacam itu tentu dilatari semangat pembaruan dalam bidang pendidikan yang selama ini dinanti. Namun Pemberian kebebasan kepada sekolah dan guru ini bukan tanpa persoalan. Pасalnya, sejauh ini, kurikulum yang dijadikan blue print kegiatan belajar mengajar biasanya selalu diberikan secara terpacet dalam bentuk perangkat kurikulum nasional, yang kental dengan nuansa sentralistik. Persoalannya, apakah sekolah-sekolah di Indonesia sudah siap mengembangkan dan melaksanakan KTSP yang akan mengubah pola dan pengembangan kurikulum? Lantas, bagaimana aplikasi KTSP dan juga bagaimana KTSP dapat mendongkrak kualitas pendidikan ?

B. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pengertian istilah-istilah terkait

Untuk memahami pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kiranya ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yang *pertama* kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

³ Permen Diknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta, 2 Juni 2006)

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;⁴ Kurikulum dalam teori pendidikan modern mempunyai pengertian tidak hanya sebatas mata pelajaran (*courses*) tapi juga mencakup pengalaman-pengalaman di luar sekolah sebagai kegiatan pendidikan.⁵

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dengan demikian secara sederhana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.⁶ Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, KTSP dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 Standar Isi,⁷ kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
2. Beragam dan terpadu
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
6. Belajar sepanjang hayat
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

3. Prinsip Pelaksanaan KTSP

⁴ *Ibid.*, pasal 1 ayat 19.

⁵ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm, 9.

⁶ Masnur Muslich, *KTSP : Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm, 17.

⁷ *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 Standar Isi, Bab II Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum, Poin A Kerangka Dasar Kurikulum, penjelasan ke-2 Prinsip Pengembangan Kurikulum.*

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006,8 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividualan, kesosialan, dan moral.
4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta

⁸ *Ibid., penjelasan ke-3 Prinsip Pelaksanaan Kurikulum.*

lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).

6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

C. Realitas Problem

KTSP merupakan bentuk operasional kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Penyusunan kurikulum ini melibatkan guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan. Keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pengembangan kurikulum berdasarkan *Self Determination Theory* akan membangkitkan gairah dan rasa memiliki yang lebih tinggi, dan tanggung jawab yang besar terhadap kurikulum, yang diharapkan dapat mendongkrak kualitas pendidikan secara holistik. Sekolah memiliki "*full authority and responsibility*" dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.⁹

KTSP sebenarnya didesain untuk mendorong proses pembelajaran yang difokuskan pada siswa. Pada naskah kurikulum yang disusun Pusat Kurikulum disebutkan bahwa pendekatan yang digunakan hendaknya berupa kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif mampu mengonstruksi ilmu pengetahuannya sendiri dengan menggunakan metodologi ilmiah, pengetahuan dasar (*foundation of knowledge*) dan keterampilan (*skills*) yang sudah diperkenalkan sebelumnya sesuai dengan tuntutan mata pelajaran yang bersangkutan. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembelajaran yang berdasarkan kompetensi menuntut perubahan, dari sekadar memahami konsep dan prinsip

⁹Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm, 105.

dasar ilmu pengetahuan menjadi kegiatan pembelajaran yang memberikan kemampuan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki pada situasi yang berbeda (*creative learning*). Siswa bukan hanya diajar *learning to know*. Sebaliknya siswa harus mampu menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari itu pada situasi yang berlainan, *learning to do*.

Problem-problem yang muncul berkenaan dengan penerapan KTSP, di antaranya:

1. Dalam implementasinya satuan-satuan pendidikan diberi keleluasaan melakukan improvisasi kurikulum, namun keleluasaan itu tidaklah bersifat mutlak. Masalahnya, Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan maupun Standar Kompetensi Dasar, sejauh ini perumusannya masih menjadi kewenangan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan demikian, keleluasaan satuan-satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP sebetulnya hanyalah menyangkut dimensi pengembangan kurikulum yang dalam istilah Soedijarto (1991) masuk kategori kurikulum tingkatan kelima. Yaitu, kurikulum yang terkait dengan pengembangan bentuk dan jenis kegiatan belajar mengajar yang dialami peserta didik.¹⁰
2. Meskipun secara akademis naskah kurikulum itu telah disiapkan, pengembangan kurikulum di tingkat dinas pendidikan kabupaten/kota dan sekolah ternyata belum sepenuhnya berhasil, terutama pada aspek penyatuan persepsi terhadap makna dan pesan KTSP. Sampai hari ini masih banyak manajemen sekolah (termasuk guru pengajar) yang memiliki penafsiran berbeda terhadap KTSP, terutama pada proses pembelajaran. Sebagai contoh,
 - a. beberapa sekolah memperlakukan KTSP semacam model belajar tuntas (*mastery learning*). Dengan KTSP, guru-guru pada setiap praktik pembelajaran diminta menetapkan skor minimal yang harus diperoleh setiap siswa sebelum yang

¹⁰Muhibuddin, "KTSP; Coba-Gagal Pembaharuan Kurikulum", dalam <http://www.kabarindone-sia.com/berita.php> (21 Oktober 2007)

- bersangkutan dapat mengikuti pokok bahasan berikutnya.¹¹ Apabila seorang siswa belum dapat mencapai angka yang dipersyaratkan, siswa bersangkutan harus mengikuti ujian ulang sampai lulus. Sebaliknya, apabila siswa yang bersangkutan sudah mampu melampaui angka yang ditetapkan, ia dapat mengikuti program pembelajaran berikutnya atau program pengayaan;
- b. Penafsiran yang lain, saat ini banyak sekolah memperbanyak frekuensi ujian tertulis, baik dalam bentuk ujian harian, pra-EBTA, Try Out, dan ujian bersama. Dengan seringnya melakukan praktik ujian, diharapkan kelemahan dan kekuatan siswa akan dapat dideteksi lebih dini. Dengan demikian, guru akan lebih mudah untuk melakukan perbaikan nilai/skor siswa yang belum mencapai standar yang diharapkan;¹²
3. Selama ini guru telah terbiasa menerima produk kurikulum yang jadi dari pemerintah. Dengan berlakunya KTSP Guru diharuskan merancang kurikulum, dengan berusaha keras menemukan kekhasan sekolah tersebut. Dengan segala keterbatasan pengetahuan membuat kurikulum mandiri, akhirnya jadilah kurikulum *copy* dan *paste* dari satu sekolah ke sekolah lain. Guru tinggal mengganti nama sekolah dan nama guru mata pelajaran yang bersangkutan. Mudah dan praktis;¹³
 4. Belum lagi masih ada tuntutan ujian nasional di tengah disparitas mutu, kualitas guru, dan sarana-prasarana belajar yang sangat tajam antar daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 58, ujian nasional tidak dilaksanakan lagi, karena menurut ayat (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Tetapi kenyataannya, ujian nasional tetap dilakukan. Sehingga proses

¹¹Laporan Umum Pelaksanaan Pendampingan dan Monitoring Satuan Pendidikan di 33 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi, dalam <http://www.puskur.net/index.php>, 12.

¹² *Ibid.* hlm, 87.

¹³ *Ibid.*, 13.

pendidikan hanya mengarah pada usaha pengejaran target kelulusan ketimbang sebagai ajang interaksi nilai-nilai dan pengetahuan. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan seperti madin dan pesantren, ketika membutuhkan pengakuan formal, harus mengalami nasib yang kurang lebih sama;

5. Dalam kaitannya dengan madrasah, muatan kurikulum yang relatif sama dengan muatan kurikulum di sekolah, menjadikan madrasah kurang memiliki jati diri sebagai lembaga yang mencetak ahli-ahli agama.

D. Analisis Faktor

Salah satu kenyataan penyelenggaraan pendidikan dalam Orde Baru ialah terpisahnya pendidikan dari masyarakat. Akibatnya pendidikan terpisah dari kebutuhan masyarakat. Intelektualisme yang sempit telah memisahkan dunia pendidikan dari kehidupan yang sebenarnya.¹⁴ Sehingga output pendidikan tidak mampu mensikapi realitas problem yang dihadapi.

Orde Baru tidak cukup tanggap mensikapi pluralitas masyarakat Indonesia yang menuntut “kemerdekaan” dunia pendidikan dari kepentingan-kepentingan sektarian, yang ingin diindoktrinasi melalui pendidikan yang sentralistik. Hal ini dapat kita simpulkan dari adanya kurikulum nasional, sebagai konsekuensi dari sistem pendidikan yang sentralistik, yang cenderung berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo.

Dalam sebuah masyarakat yang homogen, masalah kurikulum tidak terlalu merisaukan. Namun dilihat dari konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, kurikulum adalah pertarungan antar kekuasaan yang hidup dalam suatu masyarakat. Kelompok masyarakat yang dominan akan mempertahankan kurikulum untuk mempertahankan dominasinya melalui sistem persekolahan; Menurut Azyumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan “*monokulturalisme*” yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung

¹⁴H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm, 58.

implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural.¹⁵ Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala "*provinsialisme*" yang hampir tumpang tindih dengan "*etnisitas*". Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.¹⁶

Munculnya KTSP, rupanya ingin menjawab permasalahan di atas. Tetapi budaya *monokulturalisme* yang dikukuhkan oleh masa yang panjang di bawah pemerintahan Orde Baru, rupanya menjadi permasalahan tersendiri bagi penerapan KTSP, yang menuntut pendekatan multikultural. Hal ini dapat kita lihat dengan problem-problem yang muncul dalam penerapan KTSP, sebagaimana berikut:

1. Pengembangan KTSP yang beragam seharusnya mengacu pada 8 SNP17 untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Namun, saat ini penyusunan KTSP hanya mengacu pada dua standar, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SNP lainnya belum dijadikan acuan dalam pedoman penyusunan KTSP;
2. Di sisi lain pemberlakuan KTSP yang diharapkan mampu menjawab heterogenitas masyarakat yang majemuk tidak didukung oleh

¹⁵ Sofyan Effendi, Moh. Quraish Shihab, Wahyudi Ruwiyanto, *Pesan untuk presiden 2004-2009* (Jakarta : Balai Pustaka, 2004) hlm, 173.

¹⁶ Muhaemin el-Mahady, "*Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*", dalam <http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html> (27 Mei 2004)

¹⁷ *Lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi 8 jenis:*

1. *Standar isi*
2. *Standar proses*
3. *Standar kompetensi lulusan*
4. *Standar pendidik dan tenaga kependidikan*
5. *Standar sarana dan prasarana*
6. *Standar pengelolaan*
7. *Standar pembiayaan*
8. *Standar penilaian pendidikan*

Lihat UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35 ayat 1

kemampuan SDM yang memadai. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Depag kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Namun sampai saat ini, sebagaimana diakui oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 2007, aparat birokrat masih sangat banyak yang belum siap.¹⁸ Sementara itu tenaga yang ada dalam dunia pendidikan sekarang adalah mereka-mereka yang kebanyakan profesionalitasnya diukur dari warisan sistem pendidikan masa lalu, yang masih menggunakan pola-pola sentralistik. Mereka pada umumnya memang tidak dipersiapkan untuk menyusun kurikulum, dan tidak cukup memiliki kompetensi dan kreativitas dalam menyiapkan kurikulum dan segenap perangkat pembelajaran.¹⁹ Upaya-upaya peningkatan profesionalitas tenaga pendidik seperti sertifikasi juga hanya menyentuh tataran formalitasnya saja. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kriteria penentuan angka kredit dalam sertifikasi mudah dimanipulasi, sehingga korelasi antara peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi dengan peningkatan kualitas pendidikan masih diragukan.

3. Dari berbagai penafsiran dan implementasi KTSP di banyak sekolah selama beberapa tahun terakhir, belum terlihat perubahan yang cukup signifikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas karena guru masih tetap mendominasi dan berperan sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, penafsiran mereka terhadap makna kompetensi dan kriteria keberhasilan dalam pembelajaran juga masih sering dikacaukan dengan angka/nilai perolehan siswa dalam ujian tulis.²⁰ Paradigma lama masih melekat karena kebiasaan yang susah diubah, paradigma

¹⁸ "Laporan Umum Pelaksanaan Pendampingan dan Monitoring Satuan Pendidikan di 33 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi", dalam <http://www.puskur.net/index.php>, 12.

¹⁹ *Ibid.*, hlm, 13

²⁰ Syamsir Alam, "Kurikulum dan Kualitas Pendidikan", dalam <http://mediaindonesia.com/index.php>. (20 Oktober 2008)

mengajar masih tetap dipertahankan dan belum berubah menjadi paradigma membelajarkan siswa. Padahal, tuntutan KBK, pada penyusunan RPP menggunakan istilah skenario pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas, ini berarti bahwa guru sebagai sutradara dan siswa menjadi pemain, jadi guru memfasilitasi aktivitas siswa dalam mengembangkan kompetensinya sehingga memiliki kecakapan hidup (*life skill*) untuk bekal hidup dan penghidupannya sebagai insan mandiri.

4. Demikian pula, pada pihak siswa, karena kebiasaan menjadi penonton dalam kelas, mereka sudah merasa enjoy dengan kondisi menerima dan tidak biasa memberi. Selain dari karena kebiasaan yang sudah melekat mendarah daging dan sukar diubah, kondisi ini kemungkinan disebabkan karena pengetahuan guru yang masih terbatas tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana cara membelajarkan siswa. Karena penghargaan terhadap profesi guru sangat minim, boro-boro sempat waktu untuk membaca buku yang aktual, mereka sangat sibuk untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan memang itu kewajiban utama, apalagi untuk membeli buku pembelajaran yang inovatif. Mereka bukan tidak mau meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi situasi dan kondisi kurang memungkinkan. Permasalahannya adalah bagaimana mengubah kebiasaan perilaku guru dalam kelas, mengubah paradigma mengajar menjadi membelajarkan, sehingga misi KBK atau KTSP dapat terwujud.²¹
5. Ditambah lagi oleh kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, di satu sisi menerapkan KTSP yang berusaha mengakomodir heterogenitas potensi-potensi daerah, tetapi di sisi lain masih menggunakan standarisasi Nasional melalui UAN. Praktis setiap lembaga pendidikan akan selalu mengejar target kelulusan UAN, dan mengenyampingkan muatan-muatan lokal dan materi-materi yang tidak di-UAN-kan. Karena tolok ukur keberhasilan belajar siswa adalah kelulusan UAN.

²¹ Erman Suherman, "Model Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Siswa", <http://educare.e-fkipunla.net/> (Vol. 5/Vol. 5, No. 2)

E. Akibatnya

KTSP pada dasarnya merespon adanya perubahan dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia dari paradigma sentralistik ke desentralistik.²² Walaupun secara konseptual sudah bagus, tetapi tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap output pendidikan. Keterbatasan demi keterbatasan dan berbagai problem yang muncul pada lembaga pendidikan menjadikan penerapan KTSP hanya berlaku pada tataran formalitas.

F. Upaya untuk Menemukan Solusi

KTSP sebenarnya sudah berhasil mengakomodasi tuntutan pendidikan abad ke-21 yang sangat menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan komunikasi dan sosial, kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil risiko (*risk-taking skills*).²³ KTSP mulai menyadari akan pentingnya *thinking skills* selain konten dalam praktik pembelajaran.²⁴ Konten memang penting, namun harus disajikan secara fleksibel dan terbuka terhadap arus perubahan, sesuai dengan sifat ilmu pengetahuan yang selalu berubah. Sedangkan *thinking skills* diberikan penekanan yang lebih besar pada KTSP sebab banyak bukti empiris menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kreatif memiliki kontribusi besar terhadap kesuksesan seseorang dalam belajar, bekerja, dan bermasyarakat.

Kurikulum seharusnya merupakan pedoman, *road-map* bagi praktik pendidikan di sekolah. Keberhasilan suatu kegiatan pendidikan di samping banyak dipengaruhi oleh kualitas guru, fasilitas pembelajaran, dan iklim sekolah, juga sangat ditentukan oleh soliditas kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang solid akan mampu menciptakan siswa/lulusan dengan

²² H. A. R. Tilaar, *Kekuasaan dan pendidikan (Magelang: Indonesia Tera, 2003)*, hlm 289.

²³ S. Widodo dan Jasmadi, *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008)*, Im, 20.

²⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008)*, hlm, 128.

kemampuan akademik yang kuat (*strong academic graduates*).²⁵ Lebih dari itu, kurikulum yang solid juga akan mampu mendorong individu siswa/lulusan untuk (1) memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa mencari kebenaran ilmiah secara konstruktif, fokus, dan terarah; (2) Berani mengambil inisiatif, berpikir kritis, dan kreatif dalam membuat setiap keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan (*sound decisions*) dan dapat memecahkan permasalahan yang rumit; (3) Memiliki kemampuan mendengar dan terbuka terhadap gagasan baru serta mampu mengemukakan gagasan dan informasi dalam bahasa yang jernih, jelas, dan percaya diri; (4) Mandiri dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang baru tanpa diliputi perasaan cemas. Sosok yang memiliki semangat untuk senantiasa melakukan penajakan terhadap peran, gagasan, dan strategi baru serta memiliki keberanian dan kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan keyakinan yang dimiliki itu.

Selain itu soliditas kurikulum juga akan berdampak langsung terhadap siswa/lulusan untuk memiliki kemauan belajar dan melakukan penajakan (*exploring*) terhadap tema dan topik yang sesuai serta relevan dengan kehidupan pribadinya, negara, dan kepentingan global; memegang teguh prinsip-prinsip moral, memiliki integritas, jujur, dan perasaan keadilan; serta memiliki kepekaan dan perasaan empati terhadap kebutuhan dan perasaan pihak lain terutama dalam menjaga komitmen dalam melayani kepentingan publik. Akhirnya, tujuan terakhir dari soliditas kurikulum juga diharapkan akan mampu membentuk mentalitas siswa/lulusan untuk senantiasa menghormati setiap bentuk perbedaan dan menjaga keseimbangan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan kehidupan pribadi.²⁶

Kemampuan dan kualitas hidup di muka merupakan tujuan dan amanat dari KTSP. Sebagaimana dikemukakan, KTSP menginginkan terbentuknya individu siswa yang mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengonstruksi ilmunya sendiri dari hasil pengalaman pembelajaran sebelumnya.²⁷ Dengan terang dan jelasnya rumusan tujuan pendidikan, pilihan metodologi dan

²⁵ Syamsir Alam, "Kurikulum dan Kualitas Pendidikan", dalam <http://mediaindonesia.com/index.php> (20 Oktober 2008)

²⁶ Paul Suparno, *Reformasi pendidikan* (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hlm, 80.

²⁷ S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm, 25.

pendekatan pembelajaran akan lebih mudah diperoleh. Sebenarnya banyak pilihan metodologi dan media pembelajaran yang tersedia dan dapat dieksploitasi untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Namun, untuk memanfaatkannya secara maksimal, guru dituntut untuk lebih fleksibel, terbuka, dan mampu melakukan berbagai improvisasi dalam setiap pembelajaran di kelas.

Selain kurikulum, penilaian juga merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Pemahaman terhadap fungsi dan tujuan penilaian pendidikan yang dimiliki pengelola kebijakan penilaian pendidikan seharusnya selalu sejalan (*compatible*) dengan pemahaman pengembang kurikulum dan sekolah. Format dan substansi penilaian seharusnya dapat diselaraskan dengan proses pembelajaran dan kebutuhan kurikulum (*designing tests that are integrated with instruction and curriculum*).²⁸ Sebab penilaian hasil belajar bukanlah sebuah kegiatan independen yang dapat dipisahkan dari proses pembelajaran dan kurikulum.²⁹

Dengan demikian standarisasi nasional melalui UAN seharusnya ditiadakan dan digantikan dengan standarisasi mutu lembaga pendidikan melalui pengaktifan Akreditasi Sekolah. Hal ini tentunya menuntut pembenahan secara menyeluruh terhadap upaya-upaya di bidang pendidikan, menyangkut masalah paradigma berfikir dalam masalah pendidikan (*filosofis*), budaya sentralistik (*culture*) yang masih kuat mengakar, sistem kelembagaan, kurikulum, metode pembelajaran, manajemen sekolah, dan lingkungan pendidikan, serta lingkungan hidup di mana output pendidikan mengaktualisasikan hasil belajarnya.

Di samping pembaruan kurikulum, seyogyanya yang menjadi titik tolak tidak hanya terletak pada teori, metode dan pendekatan pembelajaran saja. Namun perlu juga dipertimbangkan aspek lain yaitu infrastruktur pendidikan.³⁰

²⁸ Masnur Muslich, *KTSP : Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, hlm, 91.

²⁹ Abdullah Sani bin Yahaya, *Mengurus Sekolah (Pahang : PTS Professional, 2006)*, hlm, 260.

³⁰ M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia (Malang : UMM Press, 2005)*, hlm, 114.

Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini adalah kesiapan seluruh elemen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan (Pemerintah, sekolah dan masyarakat), kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung dilaksanakannya kurikulum yang hendak dipakai dan kesiapan sistem atau manajemen dari tingkat pusat hingga tingkat satuan pendidikan untuk mensukseskan pelaksanaan kurikulum yang hendak digunakan.

Secara kultural kiranya perlu ada upaya-upaya yang sistematis untuk mentradisikan pendekatan multikultural dalam dunia pendidikan, agar pendidikan benar-benar mampu menjawab permasalahan riil dalam kehidupan. Tentunya butuh upaya-upaya terpadu dari seluruh elemen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, baik pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan, maupun dunia pendidikan baik dalam arti luas, yaitu masyarakat, keluarga, dan sekolah, maupun dalam arti sempit, yaitu sekolah. Hal ini sangat penting, karena kebanyakan problem yang muncul dalam penerapan KTSP, adalah masih kuatnya budaya sentralistik, yang menyebabkan amanat KTSP menjadi terkesan sangat berat untuk diemban oleh para pelaku pendidikan. Karena yang terbayang oleh para pelaku pendidikan khususnya guru, menyusun kurikulum adalah pekerjaan para pakar yang ada di pemerintahan pusat, sehingga ketika ada tuntutan untuk menyusun kurikulum mereka cenderung gak mau susah-susah dan cukup dengan *"copy-paste"*.

Mengingat masih lemahnya kemampuan di tiap-tiap satuan pendidikan, sementara ini, kiranya perlu adanya pendampingan dari tenaga-tenaga profesional dalam penyusunan dan penerapan kurikulum di tiap satuan pendidikan, karena program pendampingan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini masih jauh dari memadai untuk bisa diterapkan pada tiap-tiap satuan pendidikan.³¹

³¹Agar setiap sekolah mampu mengembangkan KTSP, dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/SE/MPN/2007 tentang perlunya pembentukan tim sosialisasi KTSP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pada tahun 2007 Pusat Kurikulum telah memprakarsai pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di 33 provinsi dan 66 kabupaten/kota, serta memberikan bantuan profesional kepada para widyaiswara dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) di seluruh Indonesia.

G. Penutup

Permasalahan dalam dunia pendidikan tidak bisa terselesaikan dengan menggunakan pendekatan satu aspek saja. Misalnya dalam masalah kurikulum, problem yang muncul merupakan akibat dari sistem pendidikan yang salah, dan kesalahan dalam hal ini akan berdampak pada sistem secara keseluruhan. Sehingga menghasilkan lingkaran setan, yang jaring-jaringnya tidak akan terputus, sebelum adanya perombakan secara sistemik terhadap kebijakan di bidang pendidikan. Artinya problem di atas memang mengharuskan perubahan secara sistemik. Sebagus apa pun kurikulum yang diterapkan tidak akan efektif tanpa adanya perubahan yang menyeluruh. Hal ini tentunya menuntut kemauan yang kuat dari semua sektor, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia pendidikan. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsir. "Kurikulum dan Kualitas Pendidikan", dalam <http://mediaindone-sia.com/index.php>. (20 Oktober 2008)
- Muhibuddin. "KTSP; Coba-Gagal Pembaharuan Kurikulum", dalam <http://www.kabarindonesia.com/berita.php> (21 Oktober 2007)
- Mulyasa, E. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, <http://kertasburam.dagdigdug.com/>
- Muslich, Masnur. *KTSP : Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Nasution, S. *Asas-asas Kurikulum*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- . *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Selanjutnya, pada tahun 2008, pembentukan TPK semula direncanakan akan dilanjutkan di 441 kabupaten/kota, tetapi karena adanya pengurangan anggaran akhirnya hanya akan dilakukan pada 293 kabupaten/kota. Selain itu, pada tahun 2008 juga dilakukan pendampingan pengembangan KTSP di 192 kabupaten/kota. Pelaksana pendampingan adalah TPK kabupaten/kota dengan nara sumber dari Pusat Kurikulum. Pada tahun 2008, pelaksanaan pendampingan di masing-masing kabupaten/kota melibatkan 50 orang TPK kabupaten/kota sebagai fasilitator pendampingan, 100 orang guru dan kepala SD, SMP, SMA, SMK, PLB, dan PAUD sebagai peserta, serta 3 orang Pusat Kurikulum sebagai nara sumber. Lihat Herry Widayastono, Pendampingan Pengembangan Kurikulum.

- Said, M. Mas'ud. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang : UMM Press, 2005.
- Sofyan Effendi, Moh. Quraish Shihab, Wahyudi Ruwiyanto. *Pesan untuk presiden 2004-2009*. Jakarta : Balai Pustaka, 2004
- Suherman, Erman. "Model Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Siswa", <http://educare.e-fkipunla.net/> (Vol. 5/Vol. 5, No. 2)
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008.
- Suparno, Paul. *Reformasi pendidikan*. Yogyakarta : Kanisius, 2002.
- Susilo, Muhammad Joko. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Tilaar, H. A. R. *Kekuasaan dan pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera, 2003.
- , *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Wahyudi, Eko. "Kurikulum Jawa Kurang Njawani", dalam www.suara-merdeka.com/harian/0703/26/opi03.htm - 10k (26 Maret 2007)
- Widodo, S. dan Jasmadi, *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008.
- Yahaya, Abdullah Sani bin. *Mengurus Sekolah*. Pahang : PTS Professional, 2006.